EKSISTENSI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK BERSENJATA

Dewa Gede Putra Bhagawanta, Fakultas Hukum Universitas Udayana, email:

dewbhagawanta@gmail.com

I Gede Pasek Eka Wisanjaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, email:

eka_wisanjaya@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v15.i01.p2

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk membahas tentang eksistensi Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta bagaimana keduanya saling berdampingan dalam situasi perang atau konflik bersenjata. Kerja sama antara dua bidang ini sangat penting di era dunia yang sangat rentan terjadinya perang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan secara konseptual. Bahan-bahan hukum dikumpulkan melalui penelitian-penelitian terdahulu (kepuustakaan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan Hak Asasi Manusia (HAM) saling melengkapi dan mendukung satu sama lain saat terjadinya konflik bersenjata dimana Hak Asasi Manusia menjadi tonggak dasar penerapan-penerapan nilai yang terkandung di dalam Hukum Humaniter Internasional.

Kata kunci: Hukum Humaniter Internasional (HHI), Hak Asasi Manusia (HAM), Konflik Bersenjata.

ABSTRACT

This research intends to discuss the existence of the International Humanitarian Law (IHL) and Human Rights (HR) and how both of them are coexist in situation of war or armed conflict. Cooperation between these two fields were very important in the era where the war is very easy to break out. The method of this research was using normative legal research with a conceptual approach. Literature's that was collected from previous studies were used in this research as a legal material. The result showed that International Humanitarian Law (IHL) and Human Rights (HR) complement and support each other where Human Rights become the basic milestone for the application of the values that contained in the International Humanitarian Law (IHL).

Keywords: International Humanitarian Law (IHL), Human Rights (HR), Armed Conflict.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

War dalam bahasa Inggris atau diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi "perang", serta disebut juga sebagai konflik bersenjata, merupakan suatu peristiwa yang sangat merugikan. Merugikan yang dimaksud adalah kondisi itu dapat membawa dampak yang buruk seperti halnya disintegrasi penduduk, kesengsaraan, bahkan kematian terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Karl Von Clausewitz mendeskripsikan perang sebagai upaya perjuangan besar-besaran oleh salah satu

kubu/pihak (negara) guna dapat mengalahkan lawannya untuk memenuhi suatu kepentingannya.¹ Sehingga melalui definisi diatas perang dapat diinterpretasikan sebagai serangkaian perselisihan antara 2 (dua) pihak atau lebih melalui pasukan bersenjata masing-masing negara dengan maksud untuk dapat saling mengalahkan serta menguasai aspek-aspek tertentu. Tentunya konflik bersenjata merupakan hal yang tidak diinginkan terjadi di muka bumi ini. Pada dewasa ini, konflik bersenjata sangat mudah terjadi sekalipun banyak negara yang sudah meratifikasi berbagai macam konvensi, dan perjanjian internasional mengenai keamanan dan perdamaian dunia untuk meminimalisir dampak dari konflik-konflik bersenjata yang timbul.

Hukum Internasional, terkhususnya Konvensi Jenewa Tahun 1949, mengelompokkan konflik bersenjata menjadi 2 (dua) bentuk yaitu konflik bersenjata non-internasional (*non-international armed conflict*), dan konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*).² Tentu saja pada setiap berlangsungnya perang akan timbul korban jiwa, baik dari unsur kombatan, maupun masyarakat sipil. Alasan ini yang kemudian mendasari upaya untuk memunculkan suatu aturan hukum mengenai perlindungan aspek kemanusiaan selama terjadinya konflik bersenjata. Upaya-upaya itu sudah berusaha direalisasikan kedalam beberapa konvensi internasional yang diakui negara-negara di dunia seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II (1977), serta Konvensi Den Haag 1907. Disamping itu, sebagai bentuk keikutsertaan dalam menjaga perdamaian dunia, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 kedalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949.³

Lazimnya sebagaimana kita ketahui, motivasi di balik terjadinya perang sangatlah beragam dan kompleks. Namun pada umumnya dilatarbelakangi oleh persaingan atas sumber daya, perbedaan ideologi, ambisi untuk menguasai daerah lain dan tidak jarang diawali dengan pertikaian antar kubu di dalam wilayah negara sendiri.⁴ Pertikaian atau peperangan bersifat sangat destruktif yang mengakibatkan para pihak menderita kerugian yang sangat besar baik kerugian nyawa maupun materil. Intensitas peperangan juga dipengaruhi oleh kemajuan zaman, perkembangan teknologi secara tidak langsung berdampak terhadap wajah perang. Senjata modern seperti pesawat tempur, rudal balistik, artileri dan senjata nuklir memiliki potensi merusak yang sangat besar. Tidak sesekali penggunaan senjata dengan tingkat destruktif yang sangat tinggi ini berdampak terhadap eksistensi masyarakat sipil yang berada disekitar maupun di dalam area peperangan.

Berdasarkan penjelasan diatas masalah ini tentu mendesak untuk melahirkan sebuah kesadaran akan pentingnya asas *military necessity* (asas kepentingan militer) dan

¹ Fahmi, Amiruldin. "Tinjauan Yuridis tentang Pengungsi Korban Perang Berdasarkan Konvensi Wina 1951 Mengenai Status Pengungsi" Skripsi S1 (Thesis) Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2019.

² Pramono, Budi. *Hukum Humaniter*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022), 39.

³ Manitik, Rachel Cherensya. "Perlindungan Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional" *Lex Privatum* 11 No. 01 (2023): 3.

⁴ Ida Bagus Abhi, "Konflik Bersenjata Internasional dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional" <https://www.scribd.com/document/367991697/KONFLIK-BERSENJATA-INTERNASIONAL-DALAM-PERSPEKTIF-HUKUM-HUMANITER-INTERNASIONAL> (diakses pada 18 Juni 2023 pukul 02.10 WITA).

asas *humanity* (asas perikemanusiaan). Asas *military necessity* mengedepankan kewenangan setiap pihak yang bersengketa untuk dapat menggunakan seluruh kekuatan militernya dalam mengalahkan pihak lawan. Berlakunya prinsip ini harus seimbang dengan prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan (*humanity*) adalah bahwa setiap pihak yang bersengketa harus mencegah melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan dalam suatu peperangan.⁵

Tidak jarang para pihak yang terlibat langsung bertindak semena-mena seperti kehilangan akal sehat dan tidak mengindahkan sifat-sifat kemanusiaan. Sekalipun para pihak yang terlibat berada dalam tatanan psikologis yang *chaos* akibat peperangan, tetapi para pihak wajib untuk bisa memilah mana tindakan yang perlu dan mana yang tidak perlu. Sebagai sebuah bagian dari Hukum Internasional publik, Hukum Humaniter memberikan pedoman dan aturan mengenai tindakan-tindakan para pihak yang terlibat di dalam konflik bersenjata dengan berusaha “mengingat” bahwa keberadaan HAM (Hak Asasi Manusia) sebagai bentuk perhormatan terhadap hak-hak individu yang terdampak konflik bersenjata. Menyadari bahwa hak individu itu ialah hak paling esensial yang dapat dimiliki seorang manusia, bahkan sejak ia dalam kandungan, maka sudah seharusnya HAM dapat dihormati, dihargai, dijaga serta dilindungi oleh sesama individu, masyarakat dan negara. Apabila hak-hak tersebut tidak diberikan kepada individu, baik oleh negara maupun aktor non-negara, maka hal tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dalam situasi di mana pelanggaran tersebut terjadi secara masif, perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai pelanggaran atau penyalahgunaan hak asasi manusia dalam skala besar.⁶

Hakekat HAM mendasari pemahaman bahwa keberadaan seorang individu secara menyeluruh dilakukan dengan penyeimbangan aspek perseorangan dengan kepentingan umum. Nilai-nilai dasar dalam HAM meliputi kesetaraan tiap individu, martabat, kebebasan, keadilan, kemanusiaan, serta tanggung jawab negara. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada kondisi peperangan sekalipun, harus disadari bahwa hak tiap individu itu tetap ada dan harus dihormati sepenuhnya. Hal ini menekankan akan sifat universalitas dari HAM yang melekat permanen dan tidak dapat dicabut. Melalui kesadaran itu maka HAM akan digunakan sebagai landasan moral dalam berinteraksi dengan sesama individu, serta untuk melindungi diri dan martabatnya.⁷ Dalam implementasinya tidak boleh dilakukan dengan sebebas-bebasnya menurut kehendak sendiri.

Pada studi terdahulu terdapat penelitian yang membahas mengenai hal dengan cakupan konteks yang serupa yaitu penelitian yang berjudul “Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional” sebuah karya tulis yang dibuat oleh Teguh Sulistia⁸, yang membahas mengenai bagaimana konflik bersenjata dan perang menciptakan lebih banyak kerugian dibandingkan keuntungan bagi kehidupan manusia. Sehingga melalui hasil analisa kajian tersebut, muncul ketertarikan penulis untuk membahas lebih lanjut secara khusus mengenai bagaimana eksistensi

⁵ Indah Sari. “Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang dan Hukum Humaniter Internasional”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, No. 2 (2021): 24.

⁶ Khan, G. “Protection of Civilians in War: The Role of International Humanitarian Law,” *JUSTICES: Journal of Law* 03, Vol 03 (2024): 204–214.

⁷ Triwahyuningsih, Susani. “Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia”. *Jurnal Hukum Legal Standing* 04, No. 02 (2018): 113.

⁸ Sulistia, T. “Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional”. *Indonesian Journal of International Law* 04, No. 03 (2021): 5.

atau kedudukan HHI itu sendiri dalam konflik bersenjata serta bagaimana korelasi antara Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional dalam mengatasi pelanggaran yang terjadi dalam konflik bersenjata.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi Hukum Humaniter Internasional dalam konflik bersenjata?
2. Bagaimana hubungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam mengatasi pelanggaran yang terjadi dalam konflik bersenjata?

1.3 Tujuan Penulisan

Tiada lain tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mengkaji bagaimana eksistensi dan kedudukan HHI dan HAM dalam memberikan kerangka hukum terhadap individu yang terdampak konflik bersenjata serta bagaimana keterkaitan keduanya dalam meminimalisir pelanggaran yang terjadi dalam konflik bersenjata. Dengan menyoroti peran HHI dan HAM, penulisan ini mengadvokasi pentingnya penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia pada setiap tahapan konflik bersenjata. Besar harapan para pembaca dapat memperoleh pemahaman lebih mendalam dan semakin kritis terhadap permasalahan-permasalahan internasional yang kerap timbul.

II. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah penelitian normatif (*normative legal research*) atau disebut secara umum sebagai penelitian kepustakaan. Metode penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan pengkajian terhadap hakekat, sistematika, serta perbandingan hukum. Penulis melakukan pendekatan instrumen hukum dan pendekatan secara konseptual. Penulis mempergunakan data sekunder yang dikumpulkan dari penelitian terdahulu orang lain, yang sudah dituangkan ke dalam bentuk bacaan berupa buku atau dokumen yang mudah diperoleh di perpustakaan, internet atau milik pribadi.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Eksistensi Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata

Para ahli mengartikan Hukum Humaniter Internasional (HHI) secara umum sebagai hukum perang (*Law's of War*), tetapi juga disebut sebagai Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*) adalah cabang dari Hukum Internasional publik yang secara spesifik memberikan pedoman hukum dalam situasi konflik bersenjata terkait tata perilaku para pihak yang "diperbolehkan" baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. Perilaku-perilaku yang berada dalam cakupan HHI telah diakui sebagai sebuah kebiasaan internasional (*international customary law*), yang berisi kewajiban-kewajiban bagi para pihak untuk dilaksanakan.⁹

⁹ Kwik, Jozef. "Algorithmic Fog of War: When Lack of Transparency Violates the Law of Armed Conflict". *Journal of Future Robot Life* 02 No. 1-2 (2021): 43-66.

Penggunaan ragam istilah untuk mendefinisikan Hukum Humaniter Internasional ini terkadang menyebabkan kebingungan pada masyarakat banyak tetapi sebenarnya istilah-istilah tersebut memiliki pengertian yang sama.¹⁰ Dalam praktik kontemporer, istilah-istilah tersebut bahkan mengalami penguatan legitimasi global melalui sistem hukum yang berbeda-beda. Prinsip-prinsip HHI juga telah diakui dalam banyak rezim hukum termasuk hukum agama, membuktikan universalitas nilai kemanusiaan dalam konflik bersenjata.¹¹

Selanjutnya dalam bahasa Indonesia, *International Humanitarian Law* diterjemahkan menjadi Hukum Humaniter Internasional (HHI), yaitu seperangkat prinsip hukum yang lahir dengan pertimbangan-pertimbangan untuk memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan di dalam berperang. Adapun pengertian para ahli terkait HHI ini sebagaimana dijabarkan oleh Starke, HHI didefinisikan sebagai serangkaian pembatasan internasional yang di dalamnya secara khusus mengatur pelarangan penggunaan kekerasan untuk menaklukan pihak lawan serta berbanding terbalik dengan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dalam mengatur tindakan-tindakan terhadap individu di dalam kondisi berperang. Hukum Humaniter Internasional melalui pandangan Haryomataram didefinisikan menjadi 2 aturan pokok yaitu:¹²

- a. HHI sebagai bingkai hukum yang menata terkait tata cara serta prasarana yang diperbolehkan untuk digunakan selama berperang (*The Hague Convention/Hukum Den Haag*);
- b. HHI sebagai bingkai hukum yang mengelompokkan perlindungan terhadap *combatant* (tentara) dan *civilian/non-combatant* (masyarakat sipil) yang terdampak oleh situasi perang (Konvensi Jenewa 1949).

Berdasarkan uraian di atas pada dasarnya keberadaan Hukum Humaniter ialah untuk menjamin perlindungan bagi mereka yang turut aktif di dalam peperangan (*combatant*) atau mereka yang tidak turut serta didalam peperangan (*non-combatant*).¹³ Lebih lanjut Konvensi Jenewa 1949 menekankan bahwa yang mendapat perlindungan dalam situasi konflik bersenjata ialah:

- a. Tentara yang terluka mendapat perlindungan dengan menjamin perlakuan tanpa diskriminasi ras, jenis kelamin, warna kulit, kenegaraan, agama, dan lain-lain (**Konvensi Pertama**);
- b. Perlindungan terhadap tentara angkatan laut yang didapati kapalnya karam dan juga perlindungan terhadap *hospital ships* atau kapal yang dijadikan rumah sakit (**Konvensi Kedua**);

¹⁰ Ambarwati, et al. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2017), 28.

¹¹ Khan, Bushra. "Book Review: Islamic Law and International Law: Peaceful Resolution of Disputes by Emilia Justyna Powell". *Research Society of International Law* 01 (2018): 186.

¹² Santika, Rossa Amanda. "Penggunaan Pesawat Tanpa Awak dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Prinsip Kepentingan Militer dan Prinsip Pembatasan Hukum Humaniter Internasional" Skripsi S1, Universitas Atma Jaya, 2018.

¹³ Sujatmoko, Andrey. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016), 172.

- c. Perlindungan terhadap tawanan perang (*prisoner of war*), dengan menekankan perlakuan manusiawi. Dalam upaya mencari informasi lawan, pihak musuh tidak diperbolehkan menggunakan metode penyiksaan (**Konvensi Ketiga**);
- d. Perlindungan terhadap warga sipil (*civilian*), para pihak menjamin perlindungan warga sipil serta diperlakukan secara manusiawi (**Konvensi Keempat**).

Lantas ruang lingkup dari Hukum Humaniter Internasional ini menimbulkan perbincangan apakah eksistensi serta penerapan HHI dalam konflik bersenjata dapat diasumsikan bahwa HHI melarang terjadinya perang? Sebenarnya Hukum Humaniter Internasional tidak melarang terjadinya perang. Melainkan HHI mempertegas batasan-batasan perilaku dan tindakan selama proses konflik bersenjata atau dengan kata lain “memanusiakan perang” agar dapat meminimalkan penderitaan manusia. HHI tidak hanya mengatur tata cara berperang secara manusiawi, tetapi juga menyentuh norma *jus cogens* seperti umumnya tindakan genosida dalam perang.

Selanjutnya, apabila konteksnya adalah untuk melarang terjadinya perang di muka bumi ini maka sangat lah mustahil.¹⁴ Bagi HHI tidak lah penting apa alasan suatu negara mengerahkan pasukannya, mengangkat senjatanya, karena HHI menekankan perlindungan individu bukan melarang alasan suatu perang itu terjadi.¹⁵ HHI menitikberatkan terhadap tantangan-tantangan perang kontemporer dan dinamika ancaman peperangan yang bertolak belakang dengan perlindungan warga sipil.¹⁶ Sehingga, secara sederhana dapat diartikan bahwa eksistensi Hukum Humaniter Internasional dijadikan sebagai “aturan main” dalam berlangsungnya suatu konflik bersenjata.

Upaya-upaya meratifikasi Hukum Humaniter Internasional oleh negara-negara damai sebagai norma yang diakui dalam penegakan HAM dalam konflik bersenjata, merupakan suatu langkah bahwa HHI dijadikan sebagai cerminan bagi negara-negara yang berpotensi berperang agar berbuat serupa dan menghormati hak-hak individu diatas kepentingan militer. Artinya, semakin banyak negara yang meratifikasi dan mengakui nilai-nilai yang terkandung didalam HHI maka semakin besar juga harapan akan pelaksanaan HHI oleh negara-negara yang sedang berperang.¹⁷ Apabila ditelusuri lebih lanjut, eksistensi Hukum Humaniter Internasional dalam konflik bersenjata dapat dipahami melalui beberapa aspek yaitu:

- a. **Perlindungan Warga Sipil**, salah satu tujuan utama dari HHI adalah untuk memberikan payung hukum berupa perlindungan korban sipil dalam konflik bersenjata. HHI melarang tegas segala bentuk serangan yang tidak manusiawi atau yang secara khusus ditujukan kepada warga sipil seperti penyerangan terhadap martabat, hak-hak kekeluargaan, keyakinan, dan praktik keagamaan,

¹⁴ Ho, Hengky. “Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina dan Israel”. *Lex Et Societatis* 7 No. 2 (2019): 170.

¹⁵ *Ibid*, 171.

¹⁶ Wijaya, Hilman, *et al.* “Inkoherensi Hukum Humaniter dengan Filosofis Perang Kontemporer”. *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4 No. 02 (2025): 575-79.

¹⁷ Asnawi, Iqbal. “Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hubungan antar Bangsa”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12 No. 01 (2017): 117.

adat istiadat, serta kebiasaan penduduk sipil.¹⁸ Selain itu, perlindungan ini juga mencakup serangan terhadap rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan infrastruktur sipil lainnya. HHI juga menegaskan prinsip-prinsip perlindungan terhadap populasi sipil yang tidak mengambil bagian dalam konflik. Adapun yang dimaksud tidak mengambil bagian ialah wanita, anak-anak, dan para pengungsi.¹⁹ Hal ini selaras dengan isi Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang dituangkan pada *The Fourth Geneva Convention of 1949*.²⁰

- b. **Perlindungan terhadap Personil Medis dan Fasilitas Kesehatan**, HHI melindungi personel medis dan fasilitas kesehatan dari serangan dan upaya gangguan selama konflik. Hal ini memastikan bahwa mereka dapat memberikan perawatan medis kepada korban konflik dengan bebas dan tanpa hambatan.
- c. **Perlindungan Tawanan Perang**, HHI memberikan perlindungan hukum kepada tawanan perang dan menetapkan standar perlakuan yang manusiawi terhadap mereka. Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 41 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949, tawanan perang menjadi salah satu entitas yang juga turut serta mendapat perlindungan. Tawanan perang dikategorikan sebagai *hors de combat* (*prohibition of attack against those hors de combat*). Dapat diartikan pula seorang prajurit dapat dijadikan target perang jika ia berada dalam keadaan yang sewajarnya, tetapi ketika ia berada pada keadaan yang sebaliknya (tidak berdaya dan tidak lagi menimbulkan ancaman) maka ia dilarang untuk diserang.²¹

3.2 Hubungan Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia dalam Mengatasi Pelanggaran yang Terjadi pada Konflik Bersenjata

Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) saling berhubungan dan memiliki peran penting dalam mengatasi pelanggaran yang terjadi dalam konflik bersenjata. Kendati HAM dan HHI adalah dua bidang yang berbeda, keduanya saling berkaitan dan saling melengkapi dalam konteks perlindungan aspek kemanusiaan didalam konflik bersenjata. Perjalanan panjang lahirnya prinsip Hak Asasi Manusia mulai dari dicetuskannya *Magna Carta Libertatum* pada tanggal 15 Juni 1215 oleh Raja John (*King John of England*), sampai dengan perkembangan HAM modern pada tahun 1948 dengan ditandai lahirnya *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mempertegas krusialnya HAM sebagai tonggak dasar kehidupan setiap individu.

Perkembangan hubungan HAM dan HHI mulai dapat dilihat pada penghujung tahun 1960-an. Nilai-nilai yang terdapat pada Hukum Humaniter Internasional juga ikut terpengaruh dan berkembang mengikuti pola dinamis dari Hak Asasi Manusia yang

¹⁸ Putri, Yunita Maya, *et al.* *Hukum Humaniter Internasional: Case and Material*. (Yogyakarta: Suluh Media, 2021), 46.

¹⁹ Poluakan, Qrei. "Perlindungan HAM Bagi Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Menurut Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perang Saudara Suriah Tahun 2011)," *Lex Administratum* 10 No. 3 (2022): 2.

²⁰ *International Committee of the Red Cross*, <https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf> (diakses pada 18 Juni 2023 pukul 11.20 WITA).

²¹ Sari, Indah. "Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang dan Hukum Humaniter Internasional". *Jurnal Hukum Ilmiah Dirgantara* 11 No. 2 (2021): 37.

terus mengalami perubahan. Tentu hal ini tidak menjadi suatu masalah, mengingat sudah seyogyanya sifat dari suatu norma hukum itu ialah fleksibel mengikuti zaman.²² Perkembangan ini terus mengalami peningkatan seiring dengan makin banyaknya terjadi pertikaian bersenjata. Misalnya seperti “Perang Enam Hari” atau dikenal “Perang Arab-Israel 1967” dan juga di belahan dunia lainnya yang menimbulkan permasalahan baik dari aspek Hukum Humaniter sendiri atau Hak Asasi Manusia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1968 menyelenggarakan konferensi internasional yang berakar dari adanya keinginan untuk mendiskusikan tentang kedudukan dan penghormatan HAM dalam situasi konflik bersenjata. Konferensi tersebut dikenal sebagai *The International Conference of Human Rights of 1968* atau Konferensi Hak Asasi Manusia Tahun 1968. Forum ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perlindungan HAM, karena untuk pertama kalinya komunitas internasional secara sistematis membahas pentingnya integrasi prinsip-prinsip HAM ke dalam situasi konflik bersenjata. Melalui konferensi ini, PBB mendiskusikan solusi untuk menyatukan konsep HAM dan prinsip HHI, sebagai respons atas banyaknya pelanggaran terhadap martabat manusia selama perang – terutama setelah Perang Dunia II dan sejumlah konflik dekolonisasi.²³

Dalam kaitannya dengan konflik bersenjata (*armed conflict*), keberadaan HAM adalah dasar dari pemberlakuan HHI. Pendangan ini dilatar belakangi oleh alasan bahwa gagasan HAM lebih dahulu ada sebelum berkembangnya konsep HHI. Konsep dan hak dasar yang terdapat di dalam HAM dikemas ke dalam sebuah bentuk rangkaian norma hukum yang berlaku secara khusus selama terjadinya peperangan atau yang dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional. Sehingga akan dipahami hubungan yang terjadi antara dua bidang ini, HHI sebagai sebuah norma dan komponen hukum internasional yang dirancang khusus untuk dapat mengurangi dampak konflik bersenjata.²⁴

Relasi antara HHI dan HAM dapat dilihat pada konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun di Timur Tengah antara Israel dan Palestina (HAMAS). Bukti sejarah modern mencatat konflik bersenjata ini telah berlangsung sejak tahun 1948 hingga saat ini. Tetapi konflik ini kembali “memanas” pada tanggal 7 Oktober 2023 dengan dikeluarkannya deklarasi perang oleh Israel terhadap HAMAS (Palestina) untuk merespon serangan mendadak yang dilancarkan HAMAS di wilayah selatan Israel. Sejak saat itu berbagai bentuk serangan artileri, rudal balistik, dan juga pertikaian bersenjata antar pasukan kedua belah pihak tidak dapat dihindarkan. Banyaknya korban dari pihak sipil yang tewas dari peperangan ini meningkatkan kesadaran global bahwa baik Israel maupun HAMAS (Palestina) telah sangat melanggar dan menunjukkan ketidakpedulian akan konsep-konsep dasar dalam Piagam PBB dan Hukum Humaniter Internasional. Tentunya hal ini bertolak belakang dengan cita-cita kemanusiaan yang

²² Universitas Airlangga, “Otto: Hukum Harus Fleksibel” <https://fh.unair.ac.id/en/otto-hukum-harus-fleksibel/> (diakses pada 18 Juni 2023 pukul 20.00 WITA).

²³ Ulfiah, Eneng. *“Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Humaniter Internasional”, Diploma atau S1 Thesis, Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin”, 2018.*

²⁴ Ibrahim, Fajar. “Penerapan Hukum Humaniter oleh Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Konflik Kemanusiaan Israel – Palestina Berdasarkan Statuta Roma 1998”. *Jurnal UNES Law Review* 6 No. 04 (2024): 12646.

mengamanatkan bahwa dalam keadaan perang sekalipun, siapapun yang bertikai (termasuk negara) harus dapat menjamin dan menaati hak-hak asasi manusia.²⁵

Urgensi akan Hak Asasi Manusia sebagai aspek yang harus dihormati semua pihak dalam situasi konflik bersenjata selalu berusaha dijunjung tinggi serta terus mengalami perkembangan. Secara substansial, Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki kesamaan pandangan terhadap pentingnya hak-hak perorangan sebagai pihak yang dilindungi selama konflik bersenjata. Penegasan kedudukan hak tiap individu tertuang dalam 4 (empat) Konvensi Jenewa 1949 (*The Geneva Convention of 1949*). Diketahui pada Pasal 3 menekankan kewajiban setiap negara untuk menghormati aturan-aturan fundamental kemanusiaan yang berada pada ranah *non-international armed conflict* (sengketa bersenjata non-internasional). Sehingga jika diinterpretasikan bahwa Pasal 3 ini secara implisit mengatur hubungan individu (sebagai warga negara) dengan Pemerintah yang dimana merupakan ketentuan paling dasar dari konsep hak asasi manusia. Instrumen yuridis seperti halnya Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 sangat diperlukan untuk dapat memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan penegakan HAM.²⁶

Selanjutnya melalui penjelasan di atas, dapat diperoleh korelasi antara Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia (HAM). Melalui berbagai kepustakaan, terdapat 3 (tiga) pandangan untuk melihat bagaimana korelasi antara Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter yakni:

- a. **Aliran Integrationis**, memberikan anggapan yaitu suatu prosedur hukum dapat berasal dari sistem hukum lainnya. Mengenai hal ini terdapat 2 (dua) kemungkinan yaitu:
 - 1) Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan dasar bagi Hukum Humaniter Internasional (HHI). HAM merupakan hak permanen yang melekat bagi setiap individu, tidak terkecuali mereka yang berada atau ikut serta dalam peperangan. Jadi dapat dikatakan Hak Asasi Manusia sebagai *genus* dan Hukum Humaniter Internasional sebagai *species* nya karena pemberlakuannya terbatas pada kondisi dan golongan tertentu;
 - 2) Bahwa HAM disebut lahir karena Hukum Humaniter Internasional. Dengan demikian maka Hak Asasi Manusia merupakan cabang dari Hukum Humaniter Internasional. Jika diurutkan melalui sudut pandang ini, maka Hukum Humaniter Internasional diposisikan lebih dulu ada dibanding Hak Asasi Manusia.
- b. **Aliran Seperatis**, perspektif pandangan ini menilai bahwa Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter sebagai dua hal yang berbeda. Sebagai sebuah komponen hukum, keduanya tidak memiliki keterkaitan satu sama lain. Yang menjadi pembeda adalah obyek, sifat, dan kapan berlakunya masing-masing hal tersebut.
- c. **Aliran Komplementaris**, pandangan komplementaris memposisikan Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia pada proses yang bertahap, berkembang secara sejajar, beriringan dan saling melengkapi.²⁷

Jika dikaitkan terhadap permasalahan bagaimana kedua aspek ini dapat berkontribusi dalam upaya mengatasi pelanggaran yang terjadi selama konflik

²⁵ Christiani, Diajeng. *Hukum Pidana Internasional*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 9.

²⁶ Astuti, Mirsa. *Hukum Humaniter Internasional*. (Medan: UMSU Press, 2024), 116.

²⁷ Jauhari, Iman. "Media Massa dan Hukum Humaniter dalam Pandangan Islam" *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12 No. 02 (2017): 165.

bersenjata, jelas pada dasarnya Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia saling mengisi dan berkaitan satu sama lain. Hukum Humaniter Internasional sebagai prinsip-prinsip yang membatasi tindakan pihak-pihak selama peperangan yang termasuk di dalamnya perlindungan warga sipil, perlakuan terhadap tawanan perang, dan larangan penggunaan senjata yang tidak manusiawi seperti senjata kimia, *flamethrower* atau senjata terlarang lainnya. Sementara itu, untuk menyediakan parameter perlindungan, Hak Asasi Manusia berperan menjadi pengingat akan penghormatan terhadap hak-hak individu yang terpengaruh dalam situasi konflik bersenjata. Hak-hak tersebut secara garis besar meliputi hak-hak fundamental termasuk hak untuk hidup, hak kebebasan, hak perlakuan yang manusiawi, serta hak-hak atas keadilan. HAM akan menjabarkan bahwa individu-individu yang terdampak akibat dari konflik bersenjata untuk tetap dilindungi oleh hak-hak mereka, kendati dalam kondisi seburuk apapun mereka berada.

Disisi lain dalam prakteknya, Hukum Humaniter Internasional dapat memberikan fondasi hukum bagi Pengadilan Pidana Internasional (ICC) sehubungan dengan penanganan perkara pelanggaran Hukum Humaniter Internasional. Diketahui bersama bahwa terdapat pula hubungan yang erat antara HHI dan Pengadilan Pidana Internasional dalam menangani situasi yang menyalahi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, misalnya berbagai bentuk tindakan kejahatan perang. Konvensi-konvensi yang berkaitan dengan HHI hanya sekedar menjabarkan perintah dan larangan tetapi tidak menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme tentang sanksi pidana yang timbul akibat pelanggaran atas perintah dan larangan itu.²⁸ Adapun Hak Asasi Manusia dapat menjadi dasar dalam pengajuan gugatan terhadap pelaku pelanggaran tersebut secara individu, atau melalui mekanisme-mekanisme hukum nasional dan internasional.

IV. KESIMPULAN SEBAGAI PENUTUP

4 KESIMPULAN

Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan dua bidang berbeda dengan tujuan yang sama yakni melindungi individu dalam konflik bersenjata. Keduanya menegaskan larangan perlakuan semena-mena terhadap kombatan maupun non-kombatan. Implementasi prinsip-prinsip HHI dan HAM yang efektif dapat meminimalkan penderitaan, melindungi keselamatan, dan mendorong perdamaian. Prinsip HAM tercermin dalam HHI, dan keterkaitan keduanya terus berkembang seiring kompleksitas konflik. HHI memberi kerangka hukum atas isu kemanusiaan dalam perang, sementara HAM menjadi dasar moral dan normatif bagi pelaksanaan hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ambarwati, et al. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 28.
- Astuti, Mirsa. *Hukum Humaniter Internasional*. (Medan: UMSU Press, 2024), 116.
- Christiani, Diajeng. *Hukum Pidana Internasional*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 9.
- Putri, Yunita Maya, et al. *Hukum Humaniter Internasional: Case and Material*. (Yogyakarta: Suluh Media, 2021), 46.

²⁸ Muhammad, Fadil. "Penegakan Hukum Pidana Internasional dalam Kejahatan Perang Terhadap Kemanusiaan" *Jurnal Preferensi Hukum* 01 No. 02 (2020): 90.

Pramono, Budi. *Hukum Humaniter*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022), 39.
Sujatmoko, Andrey. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 172.

Jurnal

- Asnawi, Iqbal. "Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hubungan Antar Bangsa". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12 No. 01 (2017)
- Ho, Hengky. "Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina dan Israel". *Lex Et Societatis* 7 No. 2 (2019).
- Ibrahim, Fajar. "Penerapan Hukum Humaniter oleh Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Konflik Kemanusiaan Israel - Palestina Berdasarkan Statuta Roma 1998". *Jurnal UNES Law Review* 6 No. 04 (2024): 12646.
- Indah Sari. "Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang dan Hukum Humaniter Internasional". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, No. 2 (2021): 24.
- Jauhari, Iman. "Media Massa dan Hukum Humaniter dalam Pandangan Islam" *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12 No. 02 (2017).
- Khan, Bushra. "Book Review: Islamic Law and International Law: Peaceful Resolution of Disputes by Emilia Justyna Powell". *Research Society of International Law* 01 (2018): 186.
- Khan, Gawhar. "Protection of Civilians in War: The Role of International Humanitarian Law," *JUSTICES: Journal of Law* 03, Vol 03 (2024): 204-214.
- Kwik, Jozef. "Algorithmic Fog of War: When Lack of Transparency Violates the Law of Armed Conflict". *Journal of Future Robot Life* 02 No. 1-2 (2021): 43-66.
- Manitik, Rachel Cherensya. "Perlindungan Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional" *Lex Privatum* 11 No. 01 (2023).
- Muhammad, Fadil. "Penegakan Hukum Pidana Internasional dalam Kejahatan Perang Terhadap Kemanusiaan" *Jurnal Preferensi Hukum* 01 No. 02 (2020).
- Poluakan, Qrei. "Perlindungan HAM Bagi Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Menurut Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perang Saudara Suriah Tahun 2011)," *Lex Administratum* 10 No. 3 (2022): 2.
- Sari, Indah. "Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang dan Hukum Humaniter Internasional". *Jurnal Hukum Ilmiah Dirgantara* 11 No. 2 (2021).
- Sulistia, T. "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional". *Indonesian Journal of International Law* 04, No. 03 (2021): 5.
- Triwahyuningsih, Susani. "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia". *Jurnal Hukum Legal Standing* 04, No. 02 (2018).
- Wijaya, Hilman, et al. "Inkoherensi Hukum Humaniter dengan Filosofis Perang Kontemporer". *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4 No. 02 (2025): 575-79.

Skripsi

- Fahmi, Amiruldin. "Tinjauan Yuridis tentang Pengungsi Korban Perang Berdasarkan Konvensi Wina 1951 Mengenai Status Pengungsi" Skripsi S1, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2019.
- Santika, Rossa Amanda. "Penggunaan Pesawat Tanpa Awak dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Prinsip Kepentingan Militer dan Prinsip Pembatasan Hukum Humaniter Internasional" Skripsi S1, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2018.

Ulfiah, Eneng. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Humaniter Internasional", Skripsi S1, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2018.

Dokumen Hukum Internasional

International Committee of the Red Cross,
<https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf>
(diakses pada 18 Juni 2023 pukul 11.20 WITA).

Internet

Ida Bagus Abhi, "Konflik Bersenjata Internasional dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional" <https://www.scribd.com/document/367991697/KONFLIK-BERSENJATA-INTERNASIONAL-DALAM-PERSPEKTIF-HUKUM-HUMANITER-INTERNASIONAL> (diakses pada 18 Juni 2023 pukul 02.10 WITA).
Universitas Airlangga, "Otto: Hukum Harus Fleksibel" <https://fh.unair.ac.id/en/otto-hukum-harus-fleksibel/> (diakses pada 18 Juni 2023 pukul 20.00 WITA).